



TERINTEGRASI DENGAN BPJS KESEHATAN MULAI 2019

Yogya Tetap Anggarkan Jamkesda

UMBULHARJO (MERAPD) - Meskipun tahun 2019 jaminan kesehatan pemerintah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tapi Pemkot Yogyakarta tetap menganggarkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Penganggaran Jamkesda itu untuk mengatasi warga miskin yang tidak tertampung BPJS Kesehatan.

"Ada itu, maksudnya anggaran Jamkesda pemerintah masih ada. Program Jamkesda memang juga harus integrasi. Tapi pemerintah tetap harus menyediakan anggaran untuk *buffer* (cadangan). Misalnya ada bayi lahir dari orang tidak mampu secara ekonomi, itu kan belum terkover BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia, Minggu (4/11).

Menurutnya, penganggaran Jamkesda juga untuk mengantisipasi layanan kesehatan di rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan bagi peserta dari warga miskin kota. Misalnya anggaran darah yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi anggaran Jamkesda, lanjutnya, juga untuk menambahkan bantuan anggaran

yang dibutuhkan pasien dari masyarakat miskin yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Namun pemanfaatan anggaran Jamkesda itu tidak seperti sebelumnya yang bisa diakses dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Yogyakarta. Dia menyatakan, masyarakat Yogya yang belum mendaftar dan tidak mampu menanggung BPJS Kesehatan bisa mendaftar lewat puskesmas dan Dinkes. Tanggungan premi jaminan kesehatan itu akan ditanggung lewat Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD).

"Sudah tidak ada lagi Jamkesda pakai KTP. Yang belum punya jaminan harus aktif mendaftar untuk mendapat PDPD itu. Desember rencana-

nya pendataan itu. Kami siapkan dulu. Ada berita acara pernyataan dari warga yang mau jadi PDPD tapi harus mau dirawat di kelas tiga," paparnya.

Dia menyebut pada APBD 2019 Kota Yogyakarta diusulkan sekitar Rp 15 miliar untuk anggaran Jamkesda dan PDPD. Anggaran tersebut juga memperkirakan potensi warga miskin yang tidak terampu BPJS Kesehatan.

Sementara itu Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati membenarkan telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk Jamkesda dan PDPD BPJS Kesehatan itu. Namun masih dilakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran itu atas rekomendasi dewan.

"Jamkesda yang ada untuk *njagani* warga yang belum masuk maupun yang tidak bisa diikuti BPJS Kesehatan. Misalnya untuk mengatasi kesehatan bagi gelandangan pengemis. Itu tidak mungkin ikut BPJS Kesehatan, karena gelandangan tidak punya nomor induk kependudukan dan KTP," terang Umi.

Di samping itu penganggaran Jamkesda juga untuk operasional program Yogya Emergency Service (YES) 118. Pada tahun 2018 sendiri untuk premi BPJS Kesehatan penerima bantuan iur daerah dan perawatan Jamkesda dianggarkan sekitar Rp 20 miliar. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005